

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) yang terpadu dalam praksis pendidikan di sekolah menunjukkan bahwa upaya pendidikan lebih mempedulikan kesejahteraan siswa. Pada gilirannya, perpaduan layanan BK dengan layanan lainnya di sekolah menjadikan siswa terbantu dalam mencapai perkembangan diri yang sesuai dengan tujuan pendidikan .

Pemangku tugas utama layanan BK adalah konselor sekolah. Ia merupakan komponen esensial layanan tersebut. Dengan kata lain, kelancaran dalam pelaksanaan program layanan BK, akan sangat bergantung kepada bagaimana konselor sekolah mampu dan sanggup menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, konselor sekolah selainnya menguasai fungsi dan unjuk kerja yang terandalkan dalam penyelenggaraan layanan BK, sehingga jatidirinya di sekolah semakin kokoh.

Fungsi dan unjuk kerja konselor di sekolah, akan tampak pada kesanggupannya untuk melakukan pelbagai aktivitas yang terlingkup dalam tugas-tugasnya. Pelbagai aktivitas yang dimaksud seyogianya menjadi identitas profesional pembeda, dibandingkan dengan tenaga kependidikan lainnya. Namun, pada tahun 1990-an, diperoleh gambaran kekaburan jatidiri konselor sekolah.

Kekaburan jatidiri konselor yang dimaksud, terungkap dalam bentuk : (a) kesalahkaprahan penyebutan 'Guru Pembimbing' untuk semua petugas

bimbingan, baik yang berlatarbelakang pendidikan BK, maupun guru bidang studi; dan (b) kesalahkaprahan dalam pelaksanaan program BK, yang salah satu programnya adalah 'Pelajaran Bimbingan'. Rochman Natawidjaja (1989:3) dalam hal ini, memprediksi sebagai berikut:

Kesalahkaprahan ini berkembang karena pengakuan dan penghargaan yang tidak jelas terhadap fungsi konselor sekolah. Apabila hal ini tidak kita benahi sejak sekarang maka profesi dan profesionalitas petugas bimbingan menjadi baur. Hal ini dengan sendirinya akan menghambat perkembangan profesi petugas bimbingan itu sendiri.

Bentuk fenomena yang diprediksi pakar bimbingan tersebut, semakin akurat manakala dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan tentang ketenagaan petugas bimbingan. Dari studi pendahuluan (1997) diperoleh informasi, bahwa di delapan Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) Kotamadya Bandung, terdapat petugas bimbingan sebanyak 60 orang, yang berlatar belakang pendidikan beragam. Dari 60 petugas tersebut, 45% berlatar belakang bukan BK. Jika di setiap SMUN terdapat 7 orang petugas bimbingan, maka 3 orang adalah mereka yang tidak berlatarbelakang pendidikan BK.

Sementara itu, konselor sekolah dalam adegan (*setting*) pendidikan merupakan petugas bimbingan yang telah dipersiapkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), - dalam hal ini IKIP dan FKIP- untuk memangku tugas serta kompeten dalam bekerja di sekolah. Konselor sekolah diproyeksikan mampu menyelenggarakan layanan program BK yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta layanan itu sendiri tidak menenggelamkan sifat keahliannya.

Namun, proyeksi tersebut belum menampakkan keseirangan dengan kenyataan unjuk kerja konselor di sekolah. Dengan kata lain, konselor sekolah belum mampu berunjuk kerja secara optimal, dibandingkan dengan tenaga kependidikan lain di sekolah. Beberapa penelitian terdahulu (Moegiadi, dkk., 1991; dan Furqon, 1987) mengindikasikan bahwa unjuk kerja lulusan BK dengan non-BK dalam menyelenggarakan konseling, ternyata hampir sama (berbeda tidak signifikan); dan iklim organisasi sekolah tempat konselor bertugas mempengaruhi unjuk kerja secara nyata.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan BK tidak berpengaruh secara berarti terhadap unjuk kerja konselor sekolah dalam menyelenggarakan konseling. Diduga, pendidikan mengenai BK belum memberikan bekal yang memadai bagi pengembangan BK itu sendiri, dan konselor sekolah kurang memperoleh pelatihan dalam menampilkan aktivitas layanan BK secara menyeluruh.

Paparan di atas mengisyaratkan adanya kesenjangan antara upaya pendidikan lembaga pendidikan penghasil tenaga konselor dengan mutu lulusannya yang berada di lapangan. Di satu pihak, lembaga pendidikan telah mempersiapkan dan membekali para calon konselor sekolah dengan sejumlah kompetensi bagi kelancaran dan keberhasilan tugas-tugasnya; namun pada pihak lain, para lulusan belum mengejawantahkan kompetensinya secara optimal dalam bentuk aktivitas layanan yang lebih bermutu.

Tampaknya, perolehan konselor sekolah dari lembaga pendidikan yang pernah ditempuhnya belum menjadi identitas profesional yang kokoh dalam dirinya. Dengan kata lain, BK belum tampak diselenggarakan dengan cara-cara yang profesional oleh konselor, sehingga pengakuan, penghargaan dan kepercayaan masyarakat pengguna (*public trust*) urung muncul.

Sementara itu, kepercayaan dari masyarakat pengguna konselor amatlah diperlukan, karena akan menentukan keberadaan profesi dan memungkinkan para konselor berfungsi dengan cara-cara yang profesional pula. Sehubungan dengan hal ini, Biggs dan Blocher (1986:7-10) mengidentifikasi, bahwa untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dibutuhkan tiga perangkat keyakinan yang berupa persepsi masyarakat terhadap : (a) kompetensi profesi; (b) kodifikasi perilaku profesional; dan (c) pelayanan yang diberikan kepada orang (klien), dengan siapa orang profesional itu bekerja. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pengguna akan muncul, apabila fungsi-fungsi konselor mengejawantah dalam bentuk aktivitas pelayanannya, baik manakala berhadapan dengan klien, maupun dalam keseluruhan perilaku pengabdianya.

Fungsi-fungsi konselor sekolah yang terejawantahkan secara berhasil guna menawarkan tantangan besar, penghargaan dan kesempatan kepada yang berminat membantu sesama manusia (klien). Ungkapan membantu, sebagaimana dikemukakan oleh Brammer dan Shostrom (1982:3) berarti menyediakan kondisi-kondisi atau kemudahan bagi klien untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan keamanan, cinta dan kehormatan, harga diri, menentukan tindakan, dan pertumbuhan aktualisasi diri;

menyediakan sumber-sumber dan keterampilan-keterampilan yang memungkinkan klien menolong dirinya sendiri.

Dalam nuansa pemikiran konseling tuntas, M.D. Dahlan (1988) menyiratkan, bahwa aspek-aspek kemudahan tersebut telah diperhatikan dan dipadukan di atas dasar tujuan hidup insani. Dengan demikian, fungsi-fungsi konselor sekolah pun terpadu dalam upaya menuntun insan atau klien dalam meniti jalan lurus kepada ridha Allah Swt.

Fenomena di atas menampakkan permasalahan BK yang mendasar serta memerlukan kepedulian serius dalam bentuk studi, baik yang berkenaan dengan kategorisasi konselor, kompetensi, maupun fungsi-fungsi profesionalnya. Studi yang dimaksud dipandang perlu dilakukan dengan segera, dalam upaya membenahi dan mengembangkan profesionalitas konselor sekolah yang terlingkup di dalam organisasi petugas bimbingan. Tindak lanjut dari hasil studi, tidak hanya menyingkap keadaan yang kabur atas sebutan dan pelaksanaan program BK; melainkan sampai kepada antisipasi dan implikasi peningkatan mutu layanan konselor sekolah.

#### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, memfokuskan tema studi pada fungsi-fungsi konselor sekolah yang bertugas di Sekolah Menengah Umum. Agar diperoleh keterarahan fokus dan kejelasan bangun (*construct*) studi, maka batasan operasional dan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

## 1. Batasan Konseptual dan Operasional

Di dalam penelitian tentang fungsi konselor, pertanyaan-pertanyaan berikut adalah penting untuk diperoleh jawabannya, yakni : (a) siapakah konselor itu; dan (b) apakah pekerjaan konselor itu ? Jawaban atas pertanyaan pertama akan menyingkapkan hakikat manusia dan masyarakat yang menjadi klien layanan, sebagai landasan perkembangan dan keberadaan profesi yang bersangkutan; sedangkan pertanyaan kedua, akan menyingkapkan unjuk kerja para penyandang profesi konseling (konselor).

Penelitian ini dibatasi pada pertanyaan kedua, karena penyingkapan unjuk kerja konselor merupakan masalah yang secara fenomenal menampak pada fungsi konselor sekolah.

Para ahli (Froehlich, 1958; Hatch dan Costar, 1961; Zeran dan Riccio, 1962; Gibson dan Higgins, 1966) cenderung untuk mengartikan *fungsi konselor* secara konseptual ke dalam istilah *service* (layanan). Asumsi yang melandasi pembatasan tersebut menurut Gibson dan Mithcell (1986:26), adalah bahwa di dalam layanan terkandung aktivitas-aktivitas dasar (*basic activities*) para konselor dalam pelbagai adegan pengabdian; yang dapat didefinisikan, dikenali, diadministrasikan dan dievaluasi. Layanan, memungkinkan untuk dirumuskan ke dalam suatu program bimbingan, yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan penyesuaian diri individu.

Esensi dari fungsi konselor sekolah adalah membantu klien melalui pengidentifikasian dan mempertemukan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam matra pendidikan, karir, dengan matra sosial pribadinya. Adapun

perwujudan fungsi-fungsi konselor sekolah terungkap dalam bentuk aktivitas-aktivitas dasar atau aktivitas layanan pengembangan program BK, konseling, pemahaman diri siswa, perencanaan karir dan pendidikan, alih-tangan, penempatan, bantuan bagi orang tua siswa, konsultasi staf, penelitian dan hubungan masyarakat (Ibrahim, Helms dan Thompson, 1983:598).

Berdasarkan batasan konseptual di atas, tampak bahwa fungsi konselor pada dasarnya adalah aktivitas-aktivitas layanan yang seyogianya dilakukan oleh konselor. Setiap aktivitas layanan merupakan tugas pokok konselor sekolah; dalam artian, tugas-tugas tersebut di dalam penyelenggaraannya diperlukan keahlian, wewenang serta tanggung jawab yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, sejumlah tugas pokok atau aktivitas layanan yang dimaksud dijadikan objek pengambilan putusan atau pilihan konselor sekolah, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun aktivitas-aktivitas layanan yang terlingkup di dalam fungsi konselor sekolah, dapat dikemukakan ke dalam bentuk *Tabel 1.1* sebagai berikut.

**TABEL 1.1**  
**RUANG LINGKUP FUNGSI KONSELOR SEKOLAH**

No	Aktivitas Layanan	Ruang Lingkup
1	Pengembangan Program	Merumuskan tujuan; merencanakan kegiatan pencapaian tujuan; merancang metode penilaian; dan menyelenggarakan program pelatihan staf bimbingan.
2	Konseling	Jenis aktivitas hubungan bantuan interpersonal antara konselor dengan klien yang terfokus pada pertumbuhan dan penyesuaian pribadi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

3	Pemahaman diri Siswa	Upaya-upaya pertimbangan sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi klien.
4	Perencanaan Karir dan pendidikan	Bantuan penyampaian informasi tentang karir dan kesempatan pendidikan lanjutan; memandu siswa dalam merencanakan, mengembangkan; dan mengambil keputusan karir; membantu guru mengimplementasikan bimbingan karir.
5	Alih-tangan	Merekomendasi dan menerima kasus pelimpahan.
6	Penempatan	Upaya-upaya yang membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan program-program pengajaran, ekstrakurikuler, dan kelanjutan studi.
7	Membantu Orangtua Siswa	Konsultasi dan bantuan bagi orangtua dalam memecahkan persoalan sekaitan dengan karir dan pendidikan putranya.
8	Konsultasi Staf	Kegiatan-kegiatan bantuan bagi guru, konsultasi dengan psikolog dan mengadakan aktivitas bimbingan di kelas.
9	Penelitian	Pemanduan penelitian tentang karakteristik siswa, program-program dan publikasi bimbingan.
10	Hubungan Masyarakat	Membina dan mengkoordinasi khalayak pelayanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan atas pengertian, esensi dan ruang lingkup fungsi konselor tersebut, maka dalam penelitian ini, *fungsi konselor sekolah* dibatasi secara operasional sebagai *pernyataan atau tanggapan guru pembimbing SMUN tentang aktivitas-aktivitas layanan pengembangan program BK, konseling, pemahaman diri siswa, perencanaan karir dan pendidikan, alih-tangan, penempatan, membantu orangtua siswa, konsultasi staf, penelitian, hubungan masyarakat, yang dilakukan sesuai dengan pengakuannya, baik secara tertulis maupun lisan.*

Adapun yang dimaksud dengan konselor sekolah adalah *guru pembimbing atau petugas bimbingan yang berlatar belakang pendidikan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan atau Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, yang tengah bertugas di Sekolah Menengah Umum (SMU).*

## 2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

### a. *Rumusan Masalah Penelitian*

Kehadiran konselor sekolah di SMU, pada satu segi merupakan perwujudan dari hasrat penyelenggaraan pendidikan yang integral demi tercapainya perkembangan siswa yang optimal. Konselor sekolah diasumsikan sebagai tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang memadai, sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan sekolah secara lebih bermutu. Namun pada segi lain, kompetensi konselor itu belum tampak teraktualisasikan dalam bentuk penyelenggaraan program BK yang profesional di SMU. Salah satu faktor yang diduga menghambat aktualisasi kompetensi konselor tersebut adalah karena fungsi-fungsinya belum terumuskan secara jelas ke dalam program BK; atau program BK yang diselenggarakan tidak didasarkan atas fungsi-fungsi konselor sekolah yang profesional. Masalah utama dan sangat mendesak untuk diperoleh jawabannya, adalah : *Rumusan fungsi konselor seperti apa yang seyogianya mendasari program BK di SMU ?* Dengan pertanyaan lain: *Aktivitas-aktivitas layanan seperti apa yang perlu dirumuskan ke dalam kerangka pengembangan program layanan BK di SMU ?*

Sangat disadari bahwa jawaban atas masalah tersebut begitu mendasar bagi pengembangan layanan konselor sekolah yang profesional. Upaya untuk memperoleh jawabannya diperlukan keterlibatan pelbagai pihak, sebagaimana paradigma yang dianjurkan oleh Ivey dan Robin (Shertzer dan Stone, 1980:123-125), yaitu siswa, guru, administrator, orang tua siswa, pengambil kebijakan, organisasi profesi konseling dan konselor itu sendiri.

Dari pihak konselor sekolah, penelitian ini akan memperoleh jawaban berupa aktivitas-aktivitas layanan yang nyata dilakukan menurut pengakuannya; sedangkan dari pihak luar konselor akan diperoleh pernyataan aktivitas layanan yang diharapkan. Perpaduan dari dua perolehan tersebut akan merupakan susunan rumusan fungsi konselor sekolah yang ideal.

#### *b. Pertanyaan Penelitian*

Dalam merumuskan fungsi konselor sekolah, penelitian ini akan dibatasi pada penempuhan langkah-langkah sebagai berikut : (a) merumuskan aktivitas-aktivitas layanan yang diharapkan, berdasarkan atas karya para pakar dan pengambil kebijakan (Depdikbud, 1994; Rochman Natawidjaja, 1990; 1989; 1978; Gibson dan Mitchell, 1986; Corey, *et al.*, 1984; Osipow, *et al.*, 1980; Brammer, 1980; Dyer dan Vriend, 1977; Boy dan Pine, 1968); (b) merancang instrumen penelitian bertitik tolak dari hasil langkah pertama; (c) penimbangan rancangan instrumen oleh pakar bimbingan, hingga diperoleh instrumen penelitian yang terandakan kegunaannya; (d) penyebaran instrumen tersebut kepada para konselor sekolah, untuk memperoleh pernyataan atau tanggapan mereka secara tertulis yang sekaligus merupakan data penelitian; (e) mewawancarai konselor sekolah muda, madya, dan senior, dalam rangka memperoleh pernyataan lisan, yang merupakan data penelitian dan bahan penganalisisan; (f) kategorisasi aktivitas layanan konselor sekolah; dan (g) menyusun kerangka pengembangan program layanan bimbingan dan konseling di SMU.

Langkah-langkah tersebut di atas, dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- (a) Aktivitas-aktivitas layanan seperti apa yang seyogianya dilakukan oleh konselor SMU berdasarkan atas pandangan para pakar ?
- (b) Aktivitas-aktivitas layanan seperti apa yang seyogianya dilakukan konselor SMU, berdasarkan hasil kebijakan ?
- (c) Aktivitas-aktivitas layanan apa saja yang dapat dipertimbangkan dan layak dirumuskan menjadi fungsi konselor SMU ?

Pertanyaan pertama akan didekati melalui penelaahan pemikiran konseptual para pakar dan hasil kebijakan tentang aktivitas-aktivitas layanan konselor sekolah, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam karya tulisnya masing-masing. Masukan dari pandangan pakar dan kebijakan, diasumsikan sebagai aktivitas-aktivitas layanan yang diharapkan (seharusnya) termaktub dalam program BK dan dilaksanakan oleh konselor sekolah.

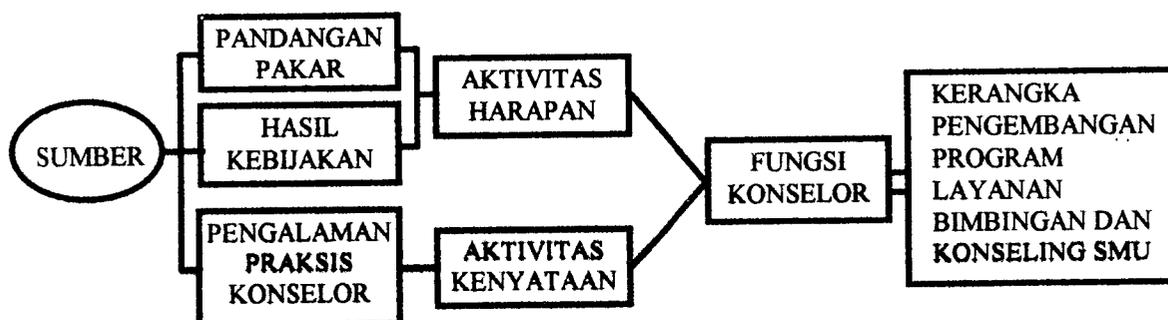
Setelah dilakukan penyeleksian dan pertimbangan rasional atas aktivitas layanan yang sesuai dengan batasan fungsi konselor sekolah, kemudian disusun menjadi rancangan instrumen yang siap dipertimbangkan oleh para pakar bimbingan. Para pakar yang dimaksud adalah Profesor dan atau Doktor yang berlatarbelakang pendidikan Bimbingan dan Konseling atau Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Hasil pertimbangan pakar dianggap sebagai rumusan aktivitas layanan yang standar sebagai instrumen penelitian atau alat pengungkap fungsi konselor sekolah.



Pertanyaan kedua, akan dijawab melalui studi empiris yang melibatkan subjek studi para konselor sekolah. Mereka diharapkan menentukan pilihan dan memaparkan pernyataan. *Pilihan*, hendaknya mereka tentukan pada setiap pernyataan tentang aktivitas layanan di dalam instrumen, yang diakuinya sesuai dengan pengalaman penyelenggaraan program bimbingan yang (nyata) dilakukan di sekolahnya. *Paparan pernyataan lisan* tentang aktivitas layanan dan alasan kegunaannya, akan diwawancarai melalui wawancara dengan sebagian subjek, setelah data pertama diperoleh. Data bentuk pertama akan dianalisis secara statistik sederhana, yakni melalui perhitungan frekuensi dan persentase; sedangkan terhadap data bentuk kedua, akan dilakukan analisis isi (*content analysis*) atas makna atau fokus yang terkandung di dalam transkrip hasil wawancara.

Pertanyaan ketiga akan dijawab melalui analisis komparatif, yakni dengan cara perbandingan rasional antara hasil analisis dari jawaban pertanyaan kedua dengan kriteria pengkategorian fungsi-fungsi konselor sekolah menurut Ibrahim, Helms dan Thompson (1983). Hasil pertanyaan ketiga, selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk penyusunan kerangka pengembangan program layanan BK di SMU. Dengan demikian, rumusan yang dimaksud merupakan hasil studi empiris.

Berikut adalah gambaran visual bangun studi fungsi konselor sekolah.



**Gambar 1.1 Bangun Studi Fungsi Konselor Sekolah**

### C. Asumsi Penelitian

Penyelenggaraan penelitian ini didasarkan atas asumsi-asumsi berikut.

*Pertama*, sejak berlakunya *Kurikulum 1975 SMA*, Bimbingan dan Penyuluhan (Bimbingan dan Konseling) merupakan bagian yang terpadu dalam keseluruhan program pendidikan pada jalur pendidikan sekolah. Posisi bimbingan yang terpadu mengandung arti bahwa ia bukan hanya sebagai penunjang, melainkan sebagai proses yang melekat (*inherent*) dalam pencapaian tujuan pendidikan.

*Kedua*, program layanan bimbingan dan konseling di SMU merupakan pedoman operasional bagi guru pembimbing dalam menjalankan fungsi pengembangan program, konseling, pemahaman diri siswa, perencanaan karir dan pendidikan, alih-tangan, penempatan, membantu orangtua siswa, konsultasi staf, penelitian dan hubungan masyarakat.

*Ketiga*, fungsi-fungsi konselor bergantung pada perspektif teoretis, tipe konseling, tempat bekerja, dan macam klien yang dilayani konselor (Corey, *et al.*, 1984). Dengan demikian realisasi fungsi ideal konselor sekolah merupakan perpaduan antara aktivitas layanan yang diharapkan dengan kenyataan yang dilakukannya.

*Keempat*, rumusan fungsi konselor sekolah berdasarkan hasil studi merupakan sumber penunjang bagi penyusunan kerangka pengembangan program layanan bimbingan dan konseling, serta peningkatan profesionalitas layanan guru pembimbing di SMU.

## **D. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk merumuskan fungsi konselor sekolah sebagai bahan penyusunan kerangka pengembangan program layanan bimbingan dan konseling di SMU. Dengan terumuskannya fungsi konselor sekolah, bukan berarti semua permasalahan tuntas terpecahkan; melainkan memunculkan dan memungkinkan terkuaknya pelbagai masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk ditelaah. Dari penelitian ini sekurang-kurangnya dapat diperoleh kontribusi bagi upaya-upaya peningkatan mutu kemampuan profesional para calon dan konselor sekolah.

### **2. Tujuan Khusus**

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, maka akan ditempuh tujuan-tujuan khusus sebagai berikut :

- (a) Merancang instrumen penelitian berdasarkan penelaahan tentang aktivitas-aktivitas layanan yang terkandung dalam pandangan pakar dan hasil kebijakan. Sebelum dipergunakan sebagai pengumpul data penelitian, instrumen tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan kelayakannya oleh pakar bimbingan dan selanjutnya diujicobakan;
- (b) Menjaring data yang berupa respons dari subjek penelitian terhadap setiap pernyataan tentang aktivitas layanan dalam instrumen hasil langkah pertama. Hasil penjarangan melalui instrumen, dianggap sebagai data empiris yang tertulis;

- (c) Menjaring data verbal tentang aktivitas-aktivitas layanan dan alasan kegunaan, yang sesuai dengan pengalaman dalam penyelenggaraan program BK para guru pembimbing di SMU. Data verbal dianggap sebagai data empiris lisan;
- (d) Mendeskripsikan kedua data empiris tersebut, untuk selanjutnya dilakukan analisis komparatif secara rasional; hingga diperoleh rumusan fungsi konselor SMU; dan
- (e) Merumuskan kerangka pengembangan program layanan BK di SMU, berdasarkan pemahaman tentang fungsi konselor yang dihasilkan penelitian ini .

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Rumusan fungsi konselor SMU berdasarkan suatu studi empiris dipandang penting keberadaannya, terutama apabila melihat kecenderungan adanya tuntutan dan kebutuhan pihak-pihak pengguna akan konselor yang mengabdikan dirinya secara profesional. Kesadaran akan hal tersebut, telah tampak diantisipasi oleh para pakar pendidikan dan bimbingan saat menjelang berakhirnya dasa warsa 1980-an dan awal kurun waktu 1990-an. Pada tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 1989 di Bali diadakan Konvensi VII dan Kongres VI IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia), yang memberikan ketegasan arah konsolidasi profesional petugas bimbingan. Kemudian pada bulan Nopember 1990, waktu itu Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung mengadakan seminar Profesionalisasi Tenaga Kependidikan, yang salah satu topiknya adalah Profesi

Konseling. Giliran berikut di kota Padang, pada tanggal 11 sampai dengan 13 Nopember 1991 diadakan Konvensi VIII dan Kongres IPBI VII, yang memberikan penegasan akan pentingnya unjuk kerja profesional petugas bimbingan.

Ada kecenderungan profesi konseling dan antisipasi para pakar di atas, mendorong untuk ditemukannya rumusan fungsi konselor sekolah, yang alasan kegunaannya sebagai berikut di bawah ini.

*Pertama*, lembaga pendidikan penghasil konselor sekolah dapat mengambil manfaat dalam menentukan kebijakan sistem perkuliahan; sehingga para calon konselor lebih memahami fungsi-fungsi yang terlingkup dalam unjuk kerja profesionalnya secara komprehensif.

*Kedua*, berguna bagi organisasi profesi petugas bimbingan yang berkewenangan untuk meningkatkan kualifikasi konselor sekolah dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling.

*Ketiga*, berguna bagi para peneliti dalam mengembangkan bangun, instrumen dan tema-tema penelitian bimbingan dan konseling selanjutnya.

*Keempat*, lembaga pengambil kebijakan dapat meraih manfaat rekomendatif hasil penelitian, guna merumuskan kerangka pengembangan program layanan bimbingan dan konseling di SMU berdasarkan fungsi-fungsi konselor yang ideal.

*Kelima*, membantu para konselor sekolah yang bertugas di SMU dalam meningkatkan mutu layanan BK secara lebih profesional.